

Kompleksitas Kerawanan Pangan Lansia: Analisis Kebijakan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia

Food Vulnerability Complexity in the Elderly: Analysis of Social Assistance Policies by Local Government in Indonesia.

Journal of Humanity and Social Justice.
Volume 5 Issue 2, 2023. 97-109
Journal Homepage:
<http://ojs.isjn.or.id/index.php/journalhsj>
e-ISSN: 2657-148X

Huzaimah¹, Hasbi Marissangan², Rahmat Muhammad³

ARTICLE INFO

Keywords:

social policy; elderly; food insecurity; local government

Kata kunci:

kebijakan; lanjut usia; kerawanan pangan; pemerintah daerah

How to cite:

Huzaimah, Marissangan, H., & Muhammad, R. (2023). Kompleksitas Kerawanan Pangan Lansia: Analisis Kebijakan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia. *Journal of Humanity and Social Justice*, 5(2), 97-109.

ABSTRACT

The concerns of the elderly, particularly related to their welfare, are increasingly significant to pay attention to because the percentage of elderly people is increasing both globally and in Indonesia. Elderly food insecurity is one of the problems that is challenging to overwhelm because the causes are different from the general population. Varied forms of policies carried out by the government to facilitate active aging so that the elderly remain active and productive in old age have not provided permanent changes for the welfare of the elderly. This research is a qualitative research using phenomenology. The results of this study reveal that mindful preparation is needed in the planning of each program so it is necessary to evaluate the readiness of the elderly to receive programs carried out by the government. It is hoped that the government will pay attention to the disability index, namely the basic ADL and IADL in selecting eligible elderly people to receive venture capital assistance. So that the elderly who are no longer able to be productive are given different policies so that their implementation is more targeted and more effective in terms of budget.

Abstrak

Permasalahan lansia khususnya terkait kesejahteraannya semakin penting untuk diperhatikan karena persentase lansia semakin meningkat baik di Dunia maupun di Indonesia. Kerawanan pangan lansia adalah salah satu permasalahan yang sulit diatasi karena penyebabnya berbeda dari populasi pada umumnya. Berbagai bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mensukseskan active aging agar lansia tetap aktif dan produktif di usia tua pada kenyataannya belum memberikan perubahan yang permanen bagi kesejahteraan lansia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

¹ Corresponding Author: Badan Pusat Statistik, Indonesia. Email: huzaimah.amhas@bps.go.id

² Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

³ Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

bahwa perlu persiapan yang matang dalam perencanaan setiap program hingga perlunya evaluasi kesiapan para lansia dalam penerima program-program yang dilakukan pemerintah. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan indeks disabilitas yaitu ADL dasar dan IADL dalam memilih lansia yang layak untuk menerima bantuan modal usaha. Sehingga lansia yang sudah tidak dapat produktif diberikan kebijakan berbeda sehingga implementasinya lebih tepat sasaran dan lebih efektif dari segi anggaran.

1. PENDAHULUAN

Proporsi penduduk dunia yang yang berumur 60 tahun keatas diproyeksi mengalami kenaikan 12 persen hingga 22 persen antara tahun 2015 dan tahun 2050 (WHO 2015). Indonesia sendiri tengah menuju fase *aging population* dimana hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa proporsi lansia pada tahun 2020 di Indonesia sudah mencapai 9,93 persen (Badan Pusat Statistik, 2021). Suatu negara dikatakan mengalami penuaan penduduk jika persentase penduduk lansia mencapai 10 persen lebih (Adioetomo, Asmanaedi and Toersilaningsih 2014)

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, terdapat delapan provinsi yang telah memasuki fase struktur penduduk tua karena persentase penduduk lansia yang sudah diatas 10 persen. Delapan provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (15,52 persen), Jawa Timur (14,53 persen), Jawa Tengah (14,17 persen), Sulawesi Utara (12,74 persen), Bali (12,71 persen), Sulawesi Selatan (11,24 persen), Lampung (10,22 persen), dan Jawa Barat (10,18 persen). Peningkatan jumlah penduduk struktur tua, diiringi dengan penurunan angka kelahiran (TFR) berdampak pada meningkatnya rasio ketergantungan dimana lansia secara angka dianggap beban bagi generasi produktif. Dalam struktur kependudukan, lansia merupakan kelompok usia "beban", yang berarti memiliki ketergantungan terhadap kelompok usia produktif. Jumlahnya yang semakin banyak, secara tidak langsung, memiliki dampak sosial dan ekonomi baik bagi individu, keluarga, maupun lingkungan sosial (Badan Pusat Statistik, 2022).

Selama lima tahun terakhir, rasio ketergantungan lansia terus meningkat dari 14,02 pada tahun 2017 menjadi 16,76 di tahun 2021 (Jayani 2021). Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung setidaknya 17 orang penduduk lanjut usia. Peningkatan penduduk lanjut usia berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan, termasuk perawatan, yang pada akhirnya menjadi beban ekonomi penduduk usia produktif dalam rangka pembiayaan penduduk lanjut usia. Untuk itu perlu adanya peningkatan sinergi dalam pelaksanaan program bagi lansia yang dapat mengurangi beban ketergantungan pada lansia pada kelompok usia produktif. Hal ini bertujuan agar lansia tetap sehat, mandiri dan aktif selama mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selama lansia bekerja.

Populasi lansia merupakan masalah sosiologis dan medis yang dapat dengan mudah diabaikan bila dibandingkan dengan masalah lain yang saat ini lebih mendesak di dalam negeri. Bukan hanya beban ekonomi, keluarga yang merawat

lansia juga memiliki beban psikologis tersendiri. Maraknya kekerasan terhadap lansia yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri adalah dampak dari rasa lelah yang berkepanjangan yang dirasakan anggota keluarga dan ketidakmandirian lansia secara fungsional maupun finansial. Hal ini sesuai dengan penelitian bahwa caregiver yang setiap hari berhadapan dengan lansia akan merasa tidak kuat dan cenderung merasakan stres dan kelelahan fisik yang menyebabkan ada beberapa perilaku agresivitas yang mereka lakukan seperti agresivitas verbal maupun non verbal (Putra 2021). Kekerasan yang diterima lansia kebanyakan adalah kekerasan psikologis dan kekerasan pengabaian (Aryanti, Dwidiyanti and Widyastuti 2019). Merawat lansia yang tidak mandiri butuh kesabaran dan memungkinkan akan memakan waktu yang relatif lama. Masa tua akan berjalan semakin panjang beriringan dengan semakin meningkatnya angka harapan hidup (AHH), diharapkan dalam menjalani masa tua, setiap individu tetap bahagia dan sejahtera sebelum mencapai *fixed limit of life* (kematian). Leonard Hayflick (1965) dengan teorinya tentang Hayflick limit mengungkapkan bahwa usia hidup seseorang ada batasnya yang dikenal dengan konsep *fixed limit of life* dan peran DNA (Bartlett 2014). DNA dan kromosom akan senantiasa membelah (*telomere*). Pembelahan biasanya disebabkan oleh penyakit atau hal-hal genetik yang mempercepat kematian. Jika penyakit dan penyebab kematian lainnya dapat dihindari, maka seseorang bisa hidup hingga usia 110 tahun dan itu adalah bukan waktu yang singkat. Menjalani kehidupan di usia senja yang panjang dan sejahtera adalah impian setiap manusia.

Kerawanan pangan adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius, penanda kekurangan materi yang meluas, dan masalah kebijakan publik. Pentingnya fokus pada populasi yang lebih tua karena berawal dari kesadaran bahwa kelompok ini sangatlah rentan. Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional secara fakta belum dapat lolos dari 10 besar provinsi dengan angka stunting tertinggi (Mediasulsel 2019). Lalu bagaimana dengan lansia?. Dimana mereka memiliki posisi lebih rumit dari balita karena perhatian keluarga dan pemerintah lebih banyak tercurah kepada bayi dan balita. Hal ini disinyalir terjadi keadaan dimana ketidakcukupan nutrisi yang lebih buruk terhadap kesehatan pada lansia. Dari tahun ke tahun populasi tua semakin meningkat sedangkan angka kelahiran semakin turun ditandai dengan turunnya TFR dalam 20 tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2023). Dengan semakin panjangnya angka harapan hidup tentunya diharapkan lansia bisa menjalani masa tua dengan sehat dan sejahtera.

Laporan Badan Pusat Statistik (2022) terkait prevalensi kerawanan pangan sedang ke berat di Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 3,78 persen perlu dikaji lebih dalam lagi dengan memisahkan bayi, balita, dan lansia dalam analisisnya. Hal ini disebabkan karena pendorong kerawanan pangan pada lansia berbeda dengan penyebab kerawanan pangan pada populasi pada umumnya, sehingga persentase lansia yang rawan pangan lebih tinggi daripada yang dilaporkan saat ini (Lee, Shen and Nishita 2022). Banyak masyarakat menyadari pentingnya nutrisi optimal pada usia lanjut seperti pada bayi dan balita namun ada banyak tantangan yang menghalangi pencapaian tujuan ini (Pan Foundation, 2021). Sering kali, lansia dianggap orang dewasa namun mereka sering menghadapi gangguan fungsional, disabilitas, isolasi, kurangnya transportasi dan keuangan kerentanan karena

penurunan pendapatan atau peningkatan biaya pengobatan. Mereka juga sering tinggal dengan orang lain, karena mereka mungkin tidak memiliki rumah. Sehingga mereka yang tinggal sendiri memiliki risiko lebih besar untuk menjadi rawan pangan (Park 2019). Hal ini berlaku bahkan untuk masalah seperti "terlalu sulit untuk pergi ke toko" dan "tidak dapat memasak atau makan karena masalah kesehatan" (Nord 2013), namun hal ini banyak diabaikan karena lansia dianggap terlalu dewasa untuk diasuh. Sejumlah orang tua berusaha memastikan anak cucu mereka cukup makan. Bahkan beberapa program pemerintah menargetkan lansia untuk tangguh dan ikut serta dalam pencegahan stunting dengan melibatkan lansia dalam pengasuhan bayi dan balita karena mereka dianggap lebih berpengalaman dalam pengasuhan (BKKBN 2021). Hal ini bukan hal yang salah namun, pemerintah juga tentu harus memberikan perhatian lebih kepada lansia karena mereka juga butuh bantuan dari segala aspek. Banyak lansia enggan untuk meminta bantuan atau tidak memiliki anggota keluarga yang dapat membantu mereka, baik karena jarak maupun sumber daya yang terbatas. (Purdam, Esmail and Garrat 2019). Untuk lansia yang rawan pangan, keterbatasan keuangan ini seringkali membatasi kemampuan mereka untuk mematuhi anjuran perawatan kesehatan (Mireya and Rafael 2017).

Kerawanan pangan memiliki dimensi tumpang tindih yang berbeda dan kurangnya dukungan perawatan sosial, isolasi sosial dan keterjangkauan diidentifikasi sebagai isu utama untuk orang tua baik dalam analisis survei kuantitatif dan wawancara kualitatif (Purdam, Esmail and Garrat 2019). Kesenjangan perawatan yang ditunjukkan oleh tidak adanya dukungan perawatan sosial, termasuk membantu berbelanja dan menyiapkan makanan, sangat jelas terlihat pada orang lanjut usia yang tinggal sendiri. Secara umum tidak hanya faktor personal tetapi juga kondisi sosial dapat menghambat lansia mencapai status ketahanan pangan penuh. perlu adanya berbagai pendekatan untuk mengatasi masalah kerawanan pangan di kalangan lansia baik melalui level komunitas maupun level individu (Park 2019).

Peningkatan yang signifikan pada status gizi lansia yang berada pada tingkatan dibawah optimal merupakan dampak dari penurunan nafsu makan dan kurangnya asupan makanan yang masuk kedalam tubuh lansia. Ketika individu telah memasuki masa usia lanjut, akan mengalami berbagai perubahan seperti penurunan kondisi fisik, psikis, sosial, produktivitas, ketidakmampuan bekerja atau dapat bekerja namun tidak lagi maksimal untuk pemenuhan hidup. Hal ini akan menimbulkan dampak berupa alokasi biaya besar dan peningkatan pelayanan demi peningkatan kesejahteraan para usia lanjut. Tidak hanya perubahan dan dampak dari perubahan yang hanya dialami oleh individu usia lanjut, namun individu usia lanjut juga memiliki harapan-harapan untuk tetap aktif, sehat dan mampu berkarya. Kesejahteraan yang diharapkan tentu bukan hanya dari segi ekonomi, akan tetapi kesejahteraan dari segi kesehatan juga harus menjadi salah satu fokus yang diperhatikan untuk kehidupan lanjut usia. Kemajuan dalam pengobatan dan standar hidup yang lebih baik membuat semakin banyak orang di seluruh dunia berharap untuk hidup dengan baik sampai usia tua. Namun, orang lanjut usia dicirikan oleh keragaman yang besar, dan umur panjang tidak selalu disertai dengan kesehatan yang lebih baik.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah terjunnya para lansia di sektor pertanian. Berdasarkan hasil survei Sakernas yang setiap tahun dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa pekerjaan utama penduduk di Sulawesi Selatan Sebagian masih terus didominasi di Sektor pertanian. Data juga menunjukkan bahwa lansia di Sulawesi Selatan ternyata masih aktif bekerja dan mengurus tumahtangga, hanya sebesar 0,48 persen lansia yang menganggur atau tidak melakukan aktifitas (Badan Pusat Statistik, 2021). Bahkan dari seluruh lansia yang masih aktif bekerja ada sebanyak 63,46 persen lansia di Sulawesi Selatan memiliki pekerjaan utama disektor pertanian (Badan Pusat Statistik, 2022). Penuaan populasi pertanian telah mendapat perhatian yang besar dari media dan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pengamat berkomentar tentang meningkatnya usia rata-rata petani di negara berpenghasilan rendah dan menengah dan adanya potensi implikasi negatif terhadap produksi pertanian dan kerawanan pangan (Heide-Ottosen 2014). Mensejahterakan petani lansia juga dapat menjadi langkah awal mensejahterakan lansia pada umumnya khususnya di daerah potensial penghasil padi dan beras seperti di Sulawesi Selatan, sehingga dalam penelitian ini juka akan mengkaji adanya kemungkinan kerawanan pangan pada lansia di lumbung padi nasional yang dalam hal ini adalah lansia yang terlibat dalam sektor pertanian.

Kebijakan publik didefenisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan kemasyarakatan. Saat ini semakin banyak masalah yang dianggap sebagai masalah sosial oleh para pengambil keputusan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Permasalahan baru dalam agenda kebijakan publik berbeda-beda di setiap negara, sebuah narasi yang menonjol pun muncul dengan menyatakan bahwa kebijakan publik 'sering' gagal dalam setiap implementasinya, dan beberapa bahkan mengklaim bahwa "kegagalan terjadi di mana-mana" (Mueller 2020). Jika benar, klaim ini layak mendapat perhatian mendesak dari para pengambil kebijakan sosial agar mencari cara yang lebih baik untuk menemukan solusi terhadap permasalahan sosial. Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri untuk penuaan penduduk di tahun 2030.

Penelitian tentang kebutuhan lansia harus diutamakan, karena mengatasi masalah lansia akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan dengan demikian mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah dan masyarakat untuk merawat mereka. Dengan data berbasis nasional yang kuat tentang lansia dimana berisi informasi tentang kebutuhan akan layanan, penggunaan layanan, dan hal-hal yang bersifat informatif tentang lansia akan berguna untuk data penelitian guna membantu perencanaan mengenai lansia dikemudian hari. Kebijakan terkait kesejahteraan lansia sudah banyak dilaksanakan oleh berbagai institusi pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala yang mengakibatkan kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dan tidak merata. Dibutuhkan informasi yang tepat terkait penyebab gagalnya kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya kebijakan terkait kesejahteraan lansia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan fenomenologi sebagai alat analisis. Riset fenomenologis bukan sekadar narasi historis atau catatan pengalaman harian. Riset fenomenologi memiliki kepentingan untuk menemukan realitas (kebijakan) sosial hingga pada wilayah autentiknya. Riset fenomenologi bukan berada dalam platform *problem solving* atau memahami *causa effect*. Riset fenomenologi berada pada wilayah makna (*meaning*), dan prosesnya tidak difondasikan pada kehebatan dari si peneliti dalam memaknai, melainkan pada keseluruhan *meaning* subjek yang mengalami suatu fenomena.

Subjek penelitian ini adalah individu yang terlibat langsung terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk lansia yaitu 1 pegawai dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan 2 pegawai dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan sosial terhadap kerawanan pangan lansia di Sulawesi Selatan. Karena penelitian ini membahas terkait kebijakan di Sulawesi Selatan sehingga peneliti memilih kelompok/ organisasi pembuat dan pelaku kebijakan ini sebagai unit analisis. Penelitian ini melibatkan Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian informasi yang dihimpun oleh peneliti dalam sesi wawancara akan di analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun cara memilih informan yang tepat (Farid dan Adib 2018), yaitu: (1) terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti; (2) mampu menggambarkan kembali fenomena yang dialaminya; (3) bersedia diwawancarai dan terlibat dalam proses penelitian; (4) menyetujui makna-makna intersubjektif atas fenomena yang disusun peneliti.

Penelitian ini dilaksanakan dalam 1 bulan (10 Agustus 2023-10 September 2023) atas izin dari Pemprov. Sulawesi Selatan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan daftar pertanyaan (kuesioner) menjadi alat bantu untuk merekam setiap makna yang disampaikan oleh subjek penelitian. Teknik analisis data menggunakan alur fenomenologi yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Seiring dengan berjalannya waktu, konsep tentang kemiskinan semakin berubah, namun acuannya tetap pada ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasarnya (Murdyana and Mulyana 2017) (Okuputra and Nasikh 2022). Saat ini banyak negara yang menghadapi situasi kemiskinan, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah. Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial (Adawiyah 2020). Kelompok lansia adalah kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan (TNP2K 2020). Pemerintah selalu berupaya untuk mencari solusi agar kemiskinan dan kemelaratan semakin berkurang dari waktu ke waktu. Adanya bantuan hari tua/pensiunan tidak serta merta mencegah lansia dari kerawanan

pangan. Adanya penurunan fisik pada lansia menjadi salah satu hambatan lansia dalam beraktivitas. Lansia yang telah memiliki pensiunan juga masih kesulitan untuk menggunakan dana pensiun mereka akibat mobilitas yang terbatas (Djamhari, et al. 2020). Hal ini dapat diperparah jika lansia hidup sendiri tanpa bantuan siapapun. Mengandalkan bantuan dari tetangga adalah jalan satu-satunya untuk bertahan hidup.

Populasi orang lanjut usia meningkat pesat, dan penting untuk mempertimbangkan bahwa banyak dari populasi lansia saat ini dan kedepannya mungkin akan menua sendirian, tanpa dukungan anggota keluarga, teman, atau berpartisipasi dalam kelompok atau kegiatan sosial. Dibutuhkan terobosan untuk membantu orang lanjut usia secara sosial agar dapat selalu berintegrasi ke dalam jaringan sosial mereka (atau dengan pembentukan jaringan sosial baru) (Taylor, et al. 2023). Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dan program untuk mengurangi isolasi sosial yang berujung pada kerawanan pangan pada populasi ini.

Kebijakan Dinas Sosial

Salah satu misi Dinas Sosial adalah peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk didalamnya adalah para lansia khususnya lansia terlantar. Program peningkatan kesejahteraan untuk para lansia yang terlantar adalah dengan menampung lansia di panti jompo milik Dinas Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Panti khusus lansia UPT Mappakasunggu yang beralamat di Kota Pare-Pare. Namun karena keterbatasan anggaran dan fasilitas sehingga panti tersebut hanya dapat menampung maksimal 80 lansia. Sehingga pada tahun 2022 diadakan program lanjutan untuk lansia dan disabilitas yang dinamakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Analis Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan:

“Program Usaha Ekonomi Produktif menysasar para lansia dan disabilitas yang bukan merupakan penghuni panti jompo. Program ini bukan merupakan program baru, namun merupakan program lanjutan yang sudah berlangsung selama beberapa tahun” (TA, 13 Agustus 2023).

Dalam praktiknya, banyak program yang berpihak pada kelompok lansia dan disabilitas belum mampu memberikan perubahan secara permanen terhadap peningkatan kesejahteraan hidup pada kelompok tersebut. Hal ini disebabkan ketidaksiapan penerima program dalam menjalankan kesepakatan, sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut:

“Setiap ada program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, masyarakat dan mauupun pemerintah kota terkait sangat antusias dalam menyambut setiap bantuan yang ada namun pada proses perjalanan program, terdapat beberapa hambatan khususnya program untuk lansia ini. Beberapa usaha yang dimodali pemerintah tidak berjalan dengan baik, banyak lansia mengeluh kelelahan dalam menjalankan usaha sehingga usaha yang dijalankan sudah berhenti bahkan sebelum evaluasi pertama dilaksanakan” (TA, 13 Agustus 2023).

Dalam kutipan diatas dapat dipahami bahwa manusia merupakan *human capital*, yang memiliki kemampuan dan kapasitas modal yang dapat menjadi faktor produksi

dan memiliki peran penting dalam penciptaan suatu barang dan jasa, sehingga memiliki nilai ekonomi (Madris 2021). Oleh sebab itu, jika kemampuan *human capital* sudah tidak maksimal, maka produktivitas dalam aktivitas ekonomi juga sudah tidak maksimal.

Dalam implementasinya, ketepatan sasaran program UEP ini harus dilakukan perencanaan yang matang, yaitu sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang dihadapi, dan telah dirumuskan oleh lembaga yang bersesuaian, terkait implementasi UEP, berikut adalah hasil kutipan wawancara dengan Analis perencanaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan:

“Berdasarkan monitoring dari pusat, kebijakan UEP dianggap telah memuat hal-hal yang mampu memecahkan permasalahan kesejahteraan lansia, Prosedur yang dilakukan pun sudah sesuai standar, masyarakat menyambut program ini dengan antusias. Terkait target, meskipun masih ada beberapa yang tumpang tindih dengan program instansi lain khususnya Kemensos namun itu menjadi bahan perbaikan kedepannya karena Dinas sosial tidak memiliki daftar lansia, kami hanya menerima data dari pemerintah kota untuk ditindak lanjuti” (TA, 13 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah agar target tidak tumpang tindih, sehingga distribusi bantuan dapat lebih merata.

Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan secara garis besar memiliki 3 (tiga) program utama yaitu: (1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, meliputi kegiatan penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan Cadangan Pangan dan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi; (2) Program Program Penanganan Kerawanan Pangan; meliputi kegiatan Penyusunan Peta Kerawanan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi (3) Program Pengawasan Keamanan Pangan meliputi Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Di Sulawesi Selatan, ketersediaan pangan utama beras sudah mencukupi namun ancaman kerawanan pangan sendiri masih ada, sebagaimana kutipan dalam wawancara dengan, Analis perencanaan di Dinas Provinsi Sulawesi Selatan.

“Untuk stok beras sudah aman, sedangkan ketersediaan energi dan protein sudah melebihi standar nasional, namun Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, sangat sulit diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan karena sebagian besar penduduk miskin tersebut adalah petani di pedesaan yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Sebagian besar petani tersebut berusaha tani dalam skala kecil bahkan sebagai

buruh tani. Bahkan petani kita kebanyakan adalah lansia" (WA, 14 Agustus 2023).

Program khusus yang dilaksanakan oleh dinas Ketahanan Pangan yang menyoal lansia hingga saat ini belum ada namun pemerintah tetap melakukan upaya untuk meningkatkan konsumsi pangan dan pendapatan rumah tangga melalui pemberdayaan kelompok wanita tani sebagaimana dari hasil kutipan wawancara berikut:

"Kami menjadikan peta kerawanan pangan wilayah untuk menjadi dasar penentuan kebijakan terkait ketahanan pangan untuk masyarakat. Saat ini, berdasarkan peta kerawanan pangan di Sulawesi Selatan dengan menggunakan skala prioritas maka terdapat 15 wilayah yang rawan pangan. Sehingga kami hanya menyoal daerah tersebut untuk program kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, namun dalam kegiatan itu juga ada lansia yang menjadi peserta." (EA, 14 Agustus 2023)

Dalam penerapannya, program Pekarangan Pangan lestari diharapkan mampu menjadi sumber pemenuhan gizi dan pangan khususnya untuk keluarga yang berada pada daerah rawan pangan. Untuk hasil penjualan produk-produk dari Pekarangan Pangan Lestari ini juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian keluarga secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, beberapa tantangan juga muncul seperti pada kutipan wawancara berikut:

"Beberapa jenis modal bibit yang disalurkan oleh pemerintah pusat ada yang tidak sesuai dengan iklim dan keahlian kelompok tani disini, sehingga menyebabkan ada beberapa yang gagal panen atau ternaknya mati" (WA, 14 Agustus 2023)

Dalam kutipan diatas juga dapat menjadi pelajaran bahwa koordinasi dan evaluasi dalam setiap program harus tetap dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam upaya menyoal setiap program pemerintah.

Pembahasan

Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup lansia. Baik itu melalui program yang menyoal langsung pada pendekatan individu lansia maupun melalui pendekatan pada program tingkat wilayah dan rumah tangga lansia. Lansia juga merupakan insan politik yang mempunyai aspirasi tersendiri, hal tersebut tidak bisa disamakan dengan aspirasi masyarakat pada umumnya. Karena itu Gerontologi menggunakan pendekatan ilmu politik untuk mendorong para pemimpin politik dan pemangku kebijakan mendengarkan aspirasi para lansia (Mildawani 2002). Namun dalam praktiknya, program-program yang dijalankan pemerintah menghadapi banyak tantangan. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap.

Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik (Lindblom,1986:3).

Tahap awal pengambilan kebijakan adalah, para pejabat harus dipilih terlebih dahulu untuk membahas masalah pada agenda publik. Terkait lansia, beberapa instansi yang berwenang adalah Dinas Sosial dan Kementerian sosial. Namun terkait ketahanan pangan, yang memiliki kewenangan dan keahlian adalah Dinas Ketahanan Pangan. Hal ini perlu diatur sedemikian rupa agar agenda yang akan dilaksanakan sesuai dengan keahlian pejabat terkait. Dalam pelaksanaan beberapa program antara kementerian sosial dan dinas sosial, ada kemungkinan terjadinya target yang tumpang tindih, sehingga pemerintah diharapkan duduk bersama membahas keadaan ini atau melakukan penyederhanaan organisasi agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

Permasalahan lain yang sering ditemui adalah terkait ketidaksiapan penerima program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Lansia sebagai target penerima bantuan/program adalah individu yang telah mengalami penurunan fisik dan mental (Kartinah and Sudaryanto 2008), sehingga sebelum memberikan bantuan berupa modal usaha, pemerintah harus mempertimbangkan indikator disabilitas pada lansia, yaitu ADL dan IADL. *Activities of daily living* (ADL) merupakan aktivitas yang dibutuhkan untuk hidup mandiri di masyarakat. Aktivitas ini diklasifikasikan menjadi ADL dasar dan *Instrumental Activities of Daily Living* (IADL). ADL adalah aktivitas perawatan diri dasar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fisik seseorang, seperti makan, berpakaian, dan kebersihan pribadi. IADL adalah aktivitas yang lebih kompleks yang memerlukan perencanaan dan pemikiran, seperti memasak, membersihkan, berbelanja, dan mengelola keuangan. Kesulitan dalam ADL dan IADL dapat dilihat sebagai indikator disabilitas (Guralnik & Ferrucci, 2003). Jika lansia yang indikator ADL dasar dan IADL rendah maka program bantuan usaha yang diberikan akan terhambat bahkan berujung gagal karena lansia tidak mampu secara fisik dan mental menjalankan program yang sudah ada. Bahkan beberapa dari lansia dapat menjual barang modal pemberian pemerintah untuk bertahan hidup. Bagi lansia, menjual aset untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka selama masa sulit (*uncertainty*) adalah solusi terbaik (Djamhari, et al. 2020).

Peningkatan kesejahteraan lansia melalui kebijakan sosial dibidang pertanian juga perlu menjadi perhatian. Ketidaksejahteraan petani di Sulawesi Selatan dapat menjadi ancaman khususnya bagi petani lansia yang dapat berujung pada kerawanan pangan bahkan terhadap petani pangan itu sendiri. Distribusi pangan dianggap sangat penting untuk mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kegiatan distribusi pangan difokuskan pada penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM) bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan). Persoalan kerawanan pangan lansia harus diselesaikan karena kerawanan pangan juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk menikmati layanan kesehatan yang dibutuhkan. Jika lansia yang rawan pangan mengalokasikan sumber daya mereka yang terbatas untuk

makanan maka mereka akan kesulitan untuk biaya kesehatan, begitu pula sebaliknya (Bhargava, 2016).

4. KESIMPULAN

Kebijakan sosial terhadap kerawanan pangan lansia di Sulawesi Selatan perlu dilakukan evaluasi pada setiap proses implemetasinya. Untuk ketepatan perencanaannya sudah berjalan dengan baik dan sesuai, ketepatan pelaksanaannya juga sesuai dengan prosedur yang telah disepakati dan masyarakat selalu menyambut dengan antusias setiap program yang diadakan pemerintah, namun target yang akan dituju harus memiliki kesiapan yang baik. Karena dalam menjalankan program kondisi target harus dalam keadaan tidak dalam konflik atau harmoni dan memastikan bahwa lansia yang akan diberikan bantuan usaha siap secara fisik dan mental menjalankan usaha yang telah disepakati. Pemerintah perlu menganalisis kemampuan para lansia terlebih dahulu terkait kemampuan mereka dalam beraktivitas dengan mengukur indeks disabilitas ADL dan IADL. Lansia yang memiliki indeks disabilitas yang kecil dapat diberikan bantuan program usaha namun untuk lansia yang sudah memiliki indeks disabilitas yang tinggi lebih baik diberikan program bantuan yang secara langsung dapat menghindarkan lansia dari kerawanan pangan.

Diharapkan dinas sosial dan kementerian sosial melakukan konsolidasi secara berkala agar program dan target tidak tumpang tindih. Penyatuan kekuatan dua instansi ini akan lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan kesejahteraan sosial. Selain itu, adanya konsolidasi ini dapat meringankan beban kerja dan anggaran masing-masing instansi. Pemerintah sudah seharusnya tidak fokus pada penghabisan anggaran tetapi pada pemerataan dan keefektifan program yang dilaksanakan dalam mengentaskan persoalan kesejahteraan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan terkait faktor penyebab kerawanan pangan lansia dan kebijakan dalam penanganannya. Untuk pengembangan penelitian, maka perlu kajian yang lebih luas dengan mempertimbangkan wawancara dari sudut pandang lansia. Hal ini akan sangat bermanfaat dalam membentuk pandangan yang lebih objektif dan terbuka dalam melakukan analisis.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada dekan FISIP unhas, Kepala Departemen Sosiologi Unhas, dan Kepala Prodi S2 Sosiologi Unhas, serta seluruh dosen yang bersedia memberikan waktu dan ilmunya demi terselesaikannya penelitian ini. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada bapak/ibu mahasiswa Tugas Belajar dari Badan Pusat Statistik yang saat ini sedang bertugas sebagai mahasiswa S2 di Program Studi Sosiologi Konsentrasi Kependudukan. Semoga penelitian ini membawa manfaat untuk semua orang.

REFERENSI

- Adawiyah, Sa'diyah El. (2020). Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service*, 1(1), 43-50.
- Adioetomo, Asmanaedi, and Toersilaningsih. (2014). *Menjadi Lansia : Antara Anugerah dan Tantangan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Aryanti, Dyah Putri, Meidina Dwidiyanti, and Rita Hadi Widyastuti.(2019). *Pengalaman Lansia Jawa Yang Mengalami Pengabaian Keluarga : Studi Fenomenologis*. LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Bartlett, Zane. (2014). *Embryo Project Encyclopedia*. 14 11. Accessed 10 08, 2023. <https://embryo.asu.edu/pages/hayflick-limit>.
- BKKBN. (2021). [bkkbn.go.id](https://www.bkkbn.go.id/berita-bkkbn-ajak-lansia-jadi-lansia-tangguh-dan-gandeng-ikut-cegah-stunting-serta-terhindar-covid-19). Accessed Mei 20, 2023. <https://www.bkkbn.go.id/berita-bkkbn-ajak-lansia-jadi-lansia-tangguh-dan-gandeng-ikut-cegah-stunting-serta-terhindar-covid-19>.
- Badan Pusat Statistik (2023). *Berita Resmi Statistik : Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. Exclusive Report*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- (202). *Profil Penduduk Lanjut Usia Provinsi Sulawesi Selatan 2020*. Makassar: Badan Pusat Statistik.
- 2022. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021*. Jakarta: BPS RI.
- Djamhari, Eka Afrina, Heni Ramdhaningrum, Aqilatul Layyinah, Adrian Chrisnahutama, & Darmawan Prasetya. (2020). *Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia*. Jakarta: Prakarsa.
- Farid, Muhammad, & Moh. Adib. (2018). *Fenomenologi*. Jakarta: Kencana.
- Heide-Ottosen, Sif. (2014). *The Ageing Of Rural Populations: Evidence On Older Farmers in Low- And Middle-Income Countries* . Accessed Mei 25, 2023. <https://www.helpage.org/silo/files/the-ageing-of-rural-populations-evidence-on-older-farmers-in-low-and-middleincome-countries.pdf>.
- Jayani, Dwi Hadya. (2021). *Katadata*. 23 12. Accessed 10 2023, 08. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/23/rasio-ketertinggalan-lansia-di-ri-makin-tinggi-di-2021-beban-generasi-muda-bertambah>.
- Kartinah, and Agus Sudaryanto. (2008). "Masalah Psikososial Pada Lanjut Usia." *Berita Ilmu Keperawatan* ISSN 1979-2697 93-96.
- Lee, J J, S Shen, and C Nishita. (2022). Development of Older Adult Food Insecurity Index to Assess Food Insecurity of Older Adults. *Nutrition Health Aging* 739-746.
- Madris. (2021). *Ekonomi Ketenagakerjaan dan Investasi Modal Manusia*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.
- Mediasulsel.(2019). *Angka Stunting di Sulsel Masih Tinggi di Indonesia*. 18 08. Accessed 10 08, 2023. <https://www.mediasulsel.com/angka-stunting-di-sulsel-masih-tinggi-di-indonesia/#:~:text=MAKASSAR%E2%80%9320Sulawesi%20Selatan%20menempati%20urutan%20ke-4%20yang%20memiliki,17%2C1%20persen%20pendek%20dan%2012%2C8%20persen%20sangat%20pendek>.
- Mildawani, Tris S. (2002). *Pengantar Gerontologi*. Jakarta: Lestari Kiranatama.

- Mireya, V, & P Rafael. (2017). Food insecurity measurement among older adults: Implications for policy and food security governance. *Global Food Security*, 14(2), 87-95.
- Mueller, B.(2020). Why public policies fail. *FSR Energy and Climate*. 6 April. <https://medium.com/lights-on-innovation/why-public-policy-fails-719891913f5a>.
- Murdyana, Mulyana & Mulyana, Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10(1),73-96.
- Nord, Mark. (2013). Measuring the Food Security of Elderly Persons. Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture:.
- Okuputra, Muhammad Ardiyan, & Nasikh. (2022). Pengaruh inovasi daerah terhadap kemiskinan. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 18(1) 159-166.
- Pan Pondation. (2021). Issue Brief No. 15 Food Insecurity Among Older Adult." Pan PondationN. January. Accessed Mei 2023, 25. <https://www.panfoundation.org/app/uploads/2021/02/PAN-Issue-Brief-15.pdf>.
- Park, Jae Yeon. (2019). Food insecurity among the elderly in developed countries: Insights from a multi-national analysis ,School of Human Nutrition McGill University. Accessed Mei 23, 2023. <https://escholarship.mcgill.ca/downloads/rf55zd048.pdf> .
- Purdam, K, A Esmail, & E Garrat. (2019). Food insecurity amongst older people in the UK. *British Food Journal*, 121 (3) 658-674.
- Putra, Dimas P. (2021). Hubungan Antara Tingkat Stres Dengan Agresivitas Pada Caregiver Lansia. Repository Raden Intan. Accessed 10 08, 2023. http://repository.radenintan.ac.id/14189/1/SKRIPSI_PERPUS.pdf.
- Taylor, H. O., K. Tsuchiya, A. W. Nguyen, & C. Mueller. (2023). Sociodemographic Factors and Neighborhood/Environmental Conditions Associated with Social Isolation Among Black Older Adults. *Journal of Aging and Health* 35(3-4),294-306.
- TNP2K. (2020). Perlindungan Sosial bagi Penduduk Lanjut. www.tnp2k.go.id. <https://www.tnp2k.go.id/filemanager/files/Perlindungan%20Sosial%20Lansia/Elde rly%20Brief%20-%20Bahasa%20Indonesia.pdf>.
- WHO. (2015). World Population Ageing. Analytical Report, New York: United Nation.